

## PERAN PENTING VISI-MISI UNTUK MEWUJUDKAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

B. Budiningsih

### *Abstract*

*The government always tries to improve the quality of education in higher education (private) in various ways, such as revising the set of rules and legislation, revising accreditation systems and devices, socializing, mentoring, training, and so on. Until 2015, however, private colleges accredited A or having good quality are less than 5%. Without discouraging the efforts having been made, the awareness of the importance of the role of the vision and mission in an effort to realize the quality of education is believed to be one of the obstacles. Vision, mission, values, and objectives formulated properly, should be the spirit that unites all components of the institution to achieve common goals in the agreed manner. Only if all the components of the institution are aware of the importance of vision and mission, and implement it in real activity, the quality of education will increase.*

*Key words: vision, mission, quality of education, universities*

### A. Pendahuluan

Sejak zaman orde baru, keberadaan perguruan tinggi (khususnya swasta) yang sangat banyak namun kurang dikelola dengan baik, dianggap sebagai penyebab buruknya kualitas pendidikan tinggi di tanah air. Menurut Ki Supriyoko (dalam Suara Merdeka edisi 25 Agustus 1995), pada tahun 1990-an jumlah perguruan tinggi sekitar 1200, dan kira-kira 95% di antaranya (1150) adalah perguruan tinggi swasta. Maka cukup wajar jika waktu itu pemerintah Presiden Soeharto mewacanakan pembatasan pendirian perguruan tinggi swasta yang baru ([www.journal amikom.ac.id](http://www.journal.amikom.ac.id)).

Menanggapi kondisi itu, pada tahun 1994 diresmikan Badan Akreditasi Nasional oleh Mendikbud, dan juga dilantik anggota-anggotanya. Semuanya itu untuk memenuhi tuntutan Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya mengamanatkan pembentukan Ba-

dan Akreditasi Nasional ([www.journal amikom.ac.id](http://www.journal.amikom.ac.id)).

Dewasa ini, 20 tahun kemudian, Badan Akreditasi Nasional dan segenap perangkat aturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk membenahi mutu pendidikan tinggi sudah diperbaiki dan terus ditingkatkan oleh pemerintah melalui Depdiknas, namun kualitas pendidikan kita tampaknya tidak juga membaik.

Berdasarkan data yang pernah diupload BAN PT (<http://www.kopertis12.or.id>), antara 2008-2012 ada 92 Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan hasil 8% terakreditasi A, 46% terakreditasi B, dan 46% terakreditasi C. Pada tahun 2013 ada 32 Perguruan tinggi yang terakreditasi dengan hasil 30,5% terakreditasi A, 62,5 % terakreditasi B, dan 7% terakreditasi C. Pada tahun 2014 ada 29 Perguruan tinggi yang terakreditasi dengan hasil 27,5% terakreditasi A, 65,5 % terakreditasi B, dan 7% terakreditasi C.

Jika dilihat kondisi data dari yang di-*upload* BAN PT tahun 2015 (<http://www.kopertis12.or.id>), dari 111 Universitas Swasta yang terakreditasi per 15 Januari 2015 hanya 5 universitas (4,5%) yang terakreditasi A, 40 universitas (36%) terakreditasi B, dan 66 universitas (59,5%) yang terakreditasi C. Sementara itu dari 52 Universitas Negeri yang terakreditasi pada periode yang sama, hanya 16 universitas (30%) yang terakreditasi A, 28 universitas (54%) terakreditasi B, dan 8 universitas (16%) yang terakreditasi C.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% perguruan tinggi yang berhasil mencapai akreditasi A, antara 50%-60% perguruan tinggi terakreditasi B, dan sisanya terakreditasi C. Khusus untuk perguruan tinggi swasta, kurang dari 5% yang berhasil meraih akreditasi A, kurang dari 40% meraih akreditasi B, dan itu berarti lebih dari 50% terakreditasi C. Padahal belum diperhitungkan perguruan tinggi yang tidak mendapatkan akreditasi karena hasilnya kurang dari C atau tidak memenuhi syarat. Bahkan BAN PT mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 saja ada 483 prodi yang tidak memenuhi syarat dan harus dibubarkan atau dibenahi terlebih dahulu sebelum menerima mahasiswa baru, dan itu hanya dari kalangan Perguruan Tinggi Negeri (<http://www.jpnn.com>). Prodi bermasalah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta jumlahnya pasti jauh lebih banyak lagi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, termasuk di dalamnya pendidikan tinggi, pemerintah juga memperbaiki dan menyesuaikan perangkat aturan perundang-undangan yang dibutuhkan, termasuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Repu-

blik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<http://www.kemenag.go.id>) ditegaskan bahwa "... Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. ... Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang."

Untuk menjawab tantangan zaman dan tuntutan reformasi dilakukan "... pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna" (<http://www.kemenag.go.id>).

Kecuali itu, ditegaskan juga bahwa "... Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab ([http:// www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)).

Untuk menjamin mutu pendidikan nasional, berdasarkan visi, misi dan strategi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya ditetapkan juga Mutu dan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tersebut ditetapkan lingkup Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar kompetensi lulusan; (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) standar sarana dan prasarana; (f) standar pengelolaan; (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian pendidikan (<http://www.kopertis3.or.id>).

Namun pada tahun 2011 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menetapkan 7 standar dan elemen penilaian akreditasi institusi perguruan tinggi untuk menjamin mutu pendidikan di perguruan tinggi. Adapun 7 standar tersebut meliputi: (1) visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian; (2) tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; (3) mahasiswa dan lulusan; (4) sumber daya manusia; (5) kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik; (6) pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi; (7) penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama (2011:7).

Selanjutnya ketujuh standar tersebut dijabarkan ke dalam elemen-elemen penilaian untuk dipenuhi dan dinilai berdasarkan parameter yang ditetapkan. Sebuah institusi

Perguruan Tinggi dinilai sangat baik (mendapatkan nilai akreditasi A), apabila berhasil memenuhi (bahkan melampaui) parameter-parameter yang sudah ditetapkan.

Hampir semua institusi pendidikan, apalagi perguruan tinggi, memiliki visi-misi. Bahkan visi-misi itu tertulis besar-besar di depan pintu, tempat-tempat strategis sekitar kampus, brosur-brosur, atau website mereka. Namun visi-misi yang ditulis besar-besar dan indah itu biasanya hanya terpampang sebagai hiasan, sebagai pelengkap belaka.

Jika kita mengunjungi suatu kampus, lalu menanyakan kepada dosen, karyawan, apalagi mahasiswa yang ada di situ perihal visi-misi lembaganya, jarang ada yang bisa menjawabnya dengan benar. Lebih jarang lagi yang yang bisa menjelaskannya dengan gamblang. Jika hafal pun tidak, bagaimana mungkin mereka dapat menjelaskannya? Bagaimana mungkin mereka memahaminya? Jika tidak memahaminya, bagaimana mungkin mereka dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan-kegiatan lembaga atau institusinya?

Dalam kenyataan di lapangan, sangat jarang ada mahasiswa, karyawan, dosen, bahkan staf pimpinan sekalipun yang sungguh hafal terhadap visi-misi lembaganya. Selain karena kurang peduli dan kurang melihat pentingnya, rumusan visi-misi yang terlalu panjang dan berbelit-belit kerap kali juga menjadi kendala utama: tidak menarik, tidak mudah dipahami. Kondisi ini tentu berdampak pada peran mereka mendukung lembaga atau perguruan tinggi tempatnya bergabung dalam upaya mencapai tujuannya.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menetapkan 7 standar dan elemen penilaian akreditasi institusi perguruan tinggi untuk menjamin mutu pendidikan di

perguruan tinggi, dan urutan pertamanya adalah: (1) visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian. Selanjutnya yang berkaitan dengan (2) tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; (3) mahasiswa dan lulusan; (4) sumber daya manusia; (5) kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik; (6) pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi; (7) penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama; harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian yang sudah ditetapkan (2011:1).

Dalam prosedur rencana strategis yang baik, maka urutan prosesnya: (1) pimpinan menentukan visi-misi dan tujuan institusi; (2) berdasarkan visi-misi dan tujuan itu dirumuskan kebijakan mutu institusi; (3) selanjutnya para pimpinan merumuskan sasaran mutu yang hendak dicapai; (4) sasaran mutu ini kemudian dijadikan acuan penyusunan program atau rencana kerja tahunan oleh semua fakultas, jurusan, program studi, bagian, atau unit; (5) atas semua rencana atau program yang disusun dibuat *Key Performance Indicator* (KPI)-nya di semua jenjang atau bagian (rektorat, fakultas, prodi, bagian, unit, sampai dosen); (6) KPI itu kemudian dijadikan acuan implementasi kegiatan di lingkup masing-masing; (7) di akhir tahun (periode) pimpinan meninjau kinerja atau capaian di setiap tingkatan berdasarkan KPI yang telah disusun itu (Rinda Hedwig, 2007: 2-5).

Peran visi-misi begitu penting dan vital, namun kita dihadapkan pada kenyataan bahwa hanya sedikit orang saja yang cukup peduli terhadap hal ini. Maka untuk meningkatkan, apalagi menjamin mutu pendidikan di perguruan tinggi kita masih

berhadapan dengan beberapa persoalan mendasar.

1. Mengapa masih banyak tenaga pendidikan yang kurang mempedulikan visi-misi institusi atau lembaga pendidikannya?
2. Apa akibatnya jika visi-misi institusi atau lembaga pendidikannya itu terabaikan?
3. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini?

## **B. Pembahasan**

### **1. Visi-Misi, Nilai, Dan Tujuan Institusi**

Banyak literatur menegaskan pentingnya visi, misi, nilai, dan tujuan institusi diimplementasikan dalam berbagai aspek atau kehidupan institusi sehingga menggerakkan roda kegiatan institusi ke arah cita-cita yang ditetapkan sekaligus menjamin mutunya.

#### **1.1. Pengertian Visi-Misi**

Visi mengisyaratkan tujuan puncak dari sebuah institusi dan untuk apa visi itu dicapai (Edward Sallis, 2008:216). Visi harus singkat, langsung dan menunjukkan tujuan puncak institusi. Istilah visi berasal dari kata *vision*, kata Bahasa Inggris yang berarti penglihatan. Biasanya visi juga diartikan sebagai arah, pandangan, idealisme, atau tujuan jangka panjang yang ingin disasar atau dicapai oleh institusi. Kondisi ideal di masa depan yang diyakini dapat dikejar atau dicapai oleh institusi. Visi dinyatakan dalam pernyataan singkat yang jelas, namun tegas dan bisa mencakup semua tujuan atau impian institusi.

Sedangkan misi adalah alasan sebuah institusi dibangun atau didirikan. Misi memuat berbagai kegiatan atau aktivitas yang membuat sebuah institusi bergerak ke arah visi atau tujuan yang menjadi impiannya. Jadi bisa

dikatakan bahwa misi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mendukung perusahaan hingga mencapai tujuannya.

Menurut Edward Sallis rumusan misi sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arah yang jelas baik di masa sekarang maupun di masa depan (Edward Sallis, 2008:216). Misi adalah sesuatu yang sungguh diyakini akan dapat dilakukan oleh institusi. Rumusan misi memperjelas visi dan juga memberi alasan perbedaan suatu institusi dari institusi yang lain. Misi perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam rumusan-rumusan strategis agar dapat diimplementasikan ke dalam langkah-langkah penting yang dibutuhkan institusi untuk memanfaatkan peluang-peluang dan kekuatannya. Masih menurut Edward Sallis, rumusan misi harus mudah diingat, mudah dikomunikasikan, menjelaskan sifat dasar institusi, mengandung komitmen peningkatan mutu, mengandung tujuan jangka panjang institusi, fokus pada pelanggan (*stakeholder*), dan bersifat fleksibel (Edward Sallis, 2008:217).

#### **1.2. Nilai-Nilai dan Tujuan Institusi**

Nilai adalah keutamaan-keutamaan yang ingin diekspresikan oleh institusi dalam upaya melaksanakan misi dan mendekati visinya. Nilai-nilai ini akan menjadi prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan suatu institusi (Edward Sallis, 2008:218). Nilai-nilai ini juga mengungkapkan keyakinan sekaligus harapan atau cita-cita institusi, yang terlihat dalam setiap kegiatan atau aktivitas institusi melalui orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan lain-lain. Oleh karena itu rumusan nilai pun diharapkan singkat-singkat, jelas, dan mudah

dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat di dalam institusi.

Setelah visi, misi, dan nilai-nilai dapat dirumuskan, ketiganya perlu diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan praktis baik yang berjangka pendek maupun panjang (Edward Sallis, 2008:219). Karena bersifat praktis, tujuan-tujuan itu harus cukup realistis untuk dicapai dan menjadi cita-cita jangka pendek atau panjang suatu institusi. Setiap tujuan atau sasaran yang ditentukan harus dapat diukur sehingga mudah dijabarkan ke dalam program-program kerja dan dituang ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) baik unit kerja maupun individu.

## 2. Merumuskan Visi-Misi Institusi

Mengingat semua institusi pendidikan di Indonesia ini adalah bagian dari usaha bersama seluruh bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, maka setiap visi dan misi yang dirumuskan pun harus selaras dengan visi dan misi pendidikan nasional. Visi dan misi Pendidikan Nasional telah dirumuskan dan dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### 2.1. Visi Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (<http://www.kemenag.go.id>).

### 2.2. Misi pendidikan Nasional

Berdasarkan visi Pendidikan Nasional tersebut, dirumuskan visi Pendidikan Nasional sebagai berikut.

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutbagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (<http://www.kemenag.go.id>).

Rumusan visi dan misi institusi seyogianya seiring dan sejalan dengan visi dan misi Pendidikan Nasional ini (meskipun tidak dapat menampilkan seluruhnya), baru kemudian kekhasan institusi yang membedakannya dari institusi pendidikan yang lain ditambahkan. Namun rumusan visi-misi juga harus sesuai dengan situasi institusi dan tuntutan masyarakat (*stakeholder*). Oleh karena itu perumusan visi-misi perlu diawali dengan analisis SWOT/TOWS yang cermat dan tajam, sehingga seluruh kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang ada sungguh dapat diperhitungkan dengan baik.

### 3. Implementasi Visi-Misi, Nilai, dan Tujuan Institusi

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, visi, misi, dan nilai-nilai yang sudah ditentukan dijadikan acuan untuk menentukan tujuan, yang dalam konteks monitoring dan evaluasi atau peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi biasa disebut kebijakan mutu dan kemudian dipertajam lagi menjadi sasaran mutu. Rinda Hedwig (2007:2) menyatakan bahwa visi dan misi dijabarkan menjadi serangkaian kebijakan mutu dan supaya lebih jelas benang merah yang menghubungkan antara visi, misi, dan kebijakan mutu maka dibuatlah sasaran mutu. Setelah sasaran mutu ditentukan, selanjutnya perguruan tinggi menentukan proses-proses pendukungnya agar sasaran mutu dapat tercapai.

Masih menurut Rinda Hedwig (2007:2), setelah proses pendukung ditetapkan, selanjutnya disusun struktur organisasi yang memuat unit-unit yang diperlukan untuk menunjang proses pencapaian sasaran mutu (tujuan) tersebut. Selain itu dapat juga dibuat kebijakan-kebijakan lain yang mengarah pada pencapaian sasaran mutu yang telah ditentukan.

Unit-unit dan seluruh jajaran staf (dosen, tenaga akademik, dan karyawan) menyusun *Key Performance Indicator (KPI)* baik bagi fakultas, prodi, maupun unit kerjanya, berdasarkan sasaran mutu yang sudah diturunkan dari visi dan misi. Sebagaimana disinyalir oleh Edward Sallis, dewasa ini perumusan visi-misi sudah menjadi bagian penting pendidikan, namun penyusunan strategi praktis yang mengikuti misi tersebut masih kurang lazim dilakukan. Ini berarti, bagi

sebagian (besar) lembaga pendidikan (tinggi), hanya dianggap sebagai trend, masih sebatas untuk melengkapi profil perguruan tinggi dan belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang nyata. Dengan demikian sangat wajar juga jika di sebagian besar lembaga pendidikan visi-misi tidak begitu mempengaruhi sepak terjang institusi atau lembaga, tidak banyak diketahui atau diperhatikan juga oleh dosen, tenaga akademik, dan karyawan yang menjalankan roda kegiatan institusi atau lembaga.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kurang pedulinya para pendidik dan komponen institusi lainnya terhadap visi-misi lebih disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap peran dan pentingnya visi-misi bagi institusi atau lembaga. Kebanyakan dari mereka juga tidak terlibat dalam penyusunan visi-misi yang ada. Lebih parah lagi sosialisasi oleh pimpinan (pengurus yayasan, institusi, atau lembaga) sangat jarang dilakukan. Dewasa ini kebanyakan lembaga pendidikan hanya mengikuti arus besar yang dihembuskan (sengaja atau tidak) oleh pemerintah selaku pemegang otoritas pendidikan secara nasional.

### 4. Dampak Visi-Misi Institusi

Setelah memahami pengertiannya, dapat dipastikan bahwa tanpa adanya visi dan misi, sebuah institusi atau lembaga tidak akan bisa mencapai tujuan yang diimpikan. Ibarat orang yang akan memulai sebuah perjalanan jauh, pertama-tama ia harus menentukan tujuannya (ke kota atau daerah mana ia akan pergi), dan juga caranya (menggunakan alat transportasi apa, jalur darat, laut, atau udara, kapan waktunya, bersama siapa saja, dan lain-lain). Tanpa tujuan yang ditentukan, kita tidak

akan pernah melangkah ke manapun. Demikian juga tanpa cara atau kondisi-kondisi yang sudah ditentukan, kita juga akan selalu kebingungan selama melakukan perjalanan.

Menganalogikan contoh di atas mudah diyakini, bahwa tanpa visi dan misi yang jelas, tegas, dan saling bersinergi, mustahil sebuah institusi dapat berjalan dengan baik. Tanpa dukungan seluruh komponen di dalam institusi (pimpinan, staf, dosen, karyawan) yang bersama-sama memperjuangkan visi-misi institusi, tidak mungkin juga mutu pendidikan di perguruan tinggi dapat diwujudkan sesuai idealisme yang diharapkan. Jika selama ini lembaga pendidikan pada tataran mana pun tampak tetap berjalan, itu karena mereka memang harus mengikuti arus besar yang menerpa mereka. Dengan demikian sangat wajar jika mutu atau kualitasnya pun tidak maksimal.

### C. Kesimpulan Dan Saran

Idealisme yang tertuang dalam visi dan misi suatu lembaga pendidikan adalah roh yang membakar, menyemangati, dan mengarahkan seluruh komponen institusi untuk bersama-sama berjuang dan berkarya. Roh dan semangat itulah yang semestinya membangkitkan komitmen seluruh komponen institusi (pimpinan, staf, dosen, karyawan) untuk bersama-sama meraih cita-cita dan mencapai tujuan yang dicanangkan. Hanya bila seluruh komponen institusi memperjuangkan bersama tujuan atau cita-citanya dengan cara-cara yang disepakati, niscaya kualitas institusi akan meningkat. Persoalan yang sering dihadapi, masih ada banyak pihak yang kurang mepedulikan visi dan misinya karena berbagai sebab, antara lain: visi-misi yang dimiliki terlalu sulit dipahami; visi-misinya

tidak dapat dilaksanakan; tekanan dari luar terlalu kuat.

Visi dan misi yang sulit dipahami, terlalu mengawang-awang, dan terkesan tidak relevan biasanya disusun tanpa melalui tahapan-tahapan yang semestinya. (Tentang hal ini ada banyak buku atau panduan yang dapat diacu.) Sebagian institusi bahkan mengarang begitu saja visi-misinya atau mengutip visi-misi institusi lain dengan sedikit penyesuaian sekedar untuk memenuhi kelengkapan administratif belaka. Namun banyak juga institusi yang tidak berhasil menerapkan visi-misinya karena tekanan dari luar. Contohnya: mungkinkah pribadi yang jujur dan berintegritas dibentuk dalam sebuah masyarakat yang culas dan korup?

Setelah mengkaji dan mempertimbangkan banyak hal, untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi kiranya baik jika disarankan beberapa hal berikut ini.

1. Visi, misi, nilai, dan tujuan institusi perlu disusun dan dipersiapkan dengan cermat melalui proses yang semestinya, dengan melibatkan sebanyak mungkin komponen institusi, agar diperoleh rumusan yang sungguh tepat bagi institusi.
2. Perlu diupayakan agar rumusan visi misi berorientasi ke depan, tidak terikat tren saat ini; mendorong munculnya kreativitas; mengandung tata nilai yang dihargai masyarakat; memperhatikan sejarah, budaya, dan nilai-nilai institusi; menuntut standar yang tinggi, ideal, dan diharapkan seluruh komponen institusi; mengklarifikasi manfaat dan tujuan institusi; menyemangati dan menumbuhkan dedikasi kepada institusi; mencitrakan institusi dan kekhasannya dalam persaingan; ambisius dan menantang.



- Namun rumusannya diusahakan tetap pendek, mudah dihafal, dan dipahami oleh seluruh jajaran yang ada dalam institusi.
3. Visi, misi, nilai, dan tujuan institusi perlu disosialisasikan dengan sangat memadai agar sungguh dipahami dan menjadi penggerak bagi seluruh jajaran institusi untuk melangkah maju.
  4. Rencana strategis, kebijakan mutu, sasaran mutu, program kerja, *Key Performance Indicator (KPI)*, semuanya perlu disusun dan disiapkan berdasarkan visi-misi yang sudah ditetapkan dan mengarah ke visi-misi itu juga.
  5. Pimpinan dan jajarannya perlu secara tegas menjaga dan mempertahankan visi-misi dan/atau institusinya dari intervensi atau pengaruh dari luar yang dapat merusak atau mengaburkan visi-misi, nilai-nilai, dan tujuan institusi.
- Semoga dengan secara khusus memperhatikan dan memberdayakan visi-misi institusi, makin banyak perguruan tinggi (swasta khususnya) yang mampu meningkatkan mutu pendidikannya sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan juga pemerintah melalui akreditasi-akreditasi yang dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- , *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku I – Naskah Akademik*, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011
- , *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku II – Standard dan Prosedur*, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011
- , *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku V – Pedoman Penilaian Borang dan Evaluasi Diri*, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011
- Ada 483 Prodi PTN Tak Lolos Akreditasi, <http://www.jpnn.com> , diakses tanggal 11 Mei 2015
- Akdon, *Strategic Managemen for Educational Management*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Arif Nasdianto, *Pentingnya Visi,Misi dalam Peningkatan Kinerja Lembaga Paudni*, Media Informasi Penilik Indonesia, penilikpls.blogspot.com diakses 5 Juni 2015
- Bryson, John M, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Eddy Soeryanto Soegoto, *Menciptakan Strategi Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, Yogyakarta: Ircisod , 2008
- Fandy Tjoptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003

Daftar peringkat institusi , <http://www.kopertis12.or.id>, diakses tanggal 3 Juni 2015

Ki Supriyoko, “Kendala Akreditasi Mutu PTS”, dalam *Suara Merdeka*, Edisi 25 Agustus 1995, <http://www.journal.amikom.ac.id>, diakses tanggal 3 Juni 2015

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, <http://www.Kemenag.go.id>, diakses tanggal 11 Mei 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, <http://www.kopertis3.or.id> diakses tanggal 3 Juni 2015

Rinda Hedwig, *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi – Monitoring dan Evaluasi Internal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Sunarto, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: Amus, 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, <http://www.komnasham.go.id>, diakses tanggal 11 Mei 2015